

## **Penguatan Modal Sosial pada Penataan Kawasan Kumuh Kampung Gumelem di Era Pandemi Covid-19**

### *Strengthening Social Capital on the Arrangement of the Gumelem Village Slum Area in Covid-19 Pandemic*

**Inayati Safitri**<sup>1\*)</sup>, N. Yuliasuti<sup>1</sup>, M. Maryono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

<sup>\*)</sup>Penulis untuk korespondensi: inasafitri173@gmail.com

**Sitasi:** Safitri I, Yuliasuti N, Maryono M. 2020. Strengthening Social capital on the arrangement of the gumelem village slum area in covid-19 pandemic. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020.* pp. 473-483. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

#### **ABSTRACT**

Gumelem Village is one of the slum areas in the Pemalang Regency, Central Java Province. This area has characteristics such as high population density, narrow neighborhood roads, the location of the houses that are coincided, the house is narrow and the house is inhabited by several families, and does not have a private toilet. The formation of slum settlements is an obstacle in regional development efforts. Therefore, efforts to organize areas are needed. Besides, in the current pandemic era, slum settlements are among the most vulnerable to the danger of spreading the virus because of their high density, low access to drinking water, and proper sanitation for health. This research uses the Participatory Research Appraisal (PRA) method to ensure the active involvement of the community who is the target group and place the community as the subject in the activation process. The results showed that social capital in the community and the government was not sufficiently strong to implement. For this reason, the right strategy is needed to organize the slum area of the Gumelem village in the era of the Covid-19 pandemic.

---

Keywords: covid-19 pandemic, slums, social capital

#### **ABSTRAK**

Kampung Gumelem merupakan salah satu kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan tersebut memiliki karakteristik seperti, tingkat kepadatan penduduk tinggi, sempitnya jalan lingkungan, lokasi rumah yang berhimpit, rumah yang sempit dan rumah dihuni oleh beberapa keluarga, serta tidak mempunyai MCK pribadi. Terbentuknya permukiman kumuh merupakan suatu kendala dalam upaya pembangunan daerah, untuk itu diperlukan upaya penataan kawasan. Selain itu di era pandemi saat ini, permukiman kumuh termasuk yang paling rentan terhadap bahaya penyebaran virus karena kepadatannya yang tinggi, rendahnya akses ke air minum dan sanitasi yang layak bagi kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Research Appraisal (PRA) untuk memastikan keterlibatan aktif dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial pada masyarakat dan pemerintah belum cukup kuat diterapkan. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam upaya penataan kawasan kumuh kampung gumelem di era pandemi Covid-19.

---

Kata kunci: modal sosial, pandemi covid-19, permukiman kumuh

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN: 978-979-587-903-9*

*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

## **PENDAHULUAN**

Permukiman kumuh merupakan bangunan perumahan dan permukiman yang kurang terintergrasi, terarah, terencana dan tidak memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan limbah, dan saluran air hujan yang cenderung terdegradasi (Simorangkir, 2019). Permukiman kumuh adalah produk dari pertumbuhan penduduk, kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai (Cahya, 2012). Pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan sering mengalahkan kemampuan kota dalam penyediaan pelayanannya termasuk infrastruktur dan penyediaan pemukiman yang layak bagi warganya, akibatnya muncul banyak lingkungan perumahan kumuh (Patrisia, 2017). Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi.

Permukiman kumuh perkotaan di negara berkembang adalah hanya karena pertumbuhan kota yang informal, ilegal, dan tidak terencana (Uddin, 2018). Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan menimbulkan banyak konsekuensi, khususnya secara estetika dapat menimbulkan rendahnya kualitas lingkungan. Ditelusuri lebih jauh permukiman kumuh dapat mengakibatkan konflik ruang, kawasan hunian yang padat dengan daya dukung kawasan yang rendah, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, penurunan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman. Ditambah dengan kerawanan dan konflik sosial yang disebabkan oleh kepadatan penduduk. Banyak tantangan dalam membangun ketahanan di daerah kumuh, tetapi ada juga peluang. Baru-baru ini muncul kebijakan pemerintah tentang pembangunan kota dan perubahan iklim, serta minat yang muncul di antara lembaga-lembaga untuk mengatasi masalah perkotaan, menawarkan potensi advokasi untuk membangun ketahanan di daerah kumuh perkotaan (Ahmed, 2014).

Penduduk di daerah kumuh mengalami kondisi hidup yang buruk karena lingkungannya sehingga menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan nasional terutama pada ekonomi negara (Elgizawy, 2016). Kondisi ini diperparah dengan kapasitas kelembagaan yang tidak memadai dalam pengelolaan lingkungan (Williams, 1997). Pemerintah daerah tentu sudah melakukan berbagai macam cara untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, mulai dari penataan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah sampai pada pelaksanaan teknis kegiatan. Penataan permukiman kumuh di masa pandemi Covid-19 juga harus disesuaikan dengan memperhatikan aspek dan kaidah kesehatan. Supaya dapat tercipta lingkungan yang sesuai dengan standar teknis dan sehat untuk di tinggali penduduk.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pematang Jaya mencapai 0,65% per tahun (BPS Kabupaten Pematang Jaya, 2020). Meski tidak tergolong memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan tetapi persoalan permukiman menjadi salah satu isu penting, terutama terkait dengan banyaknya permukiman kumuh yang tersebar di berbagai penjuru kota. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melakukan pembenahan dan penataan permukiman kumuh untuk mencapai target pembangunan daerah. Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di wilayah Kabupaten Pematang Jaya, luasannya mencapai 326,82 Ha, tersebar di 4 (empat) wilayah kecamatan dan 26 (dua puluh enam) desa, yang terbesar ada di Kecamatan Pematang Jaya (144,33 ha). Rencana aksi pembenahan permukiman kumuh Kabupaten Pematang Jaya dituangkan dalam memorandum program Rencana Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), diantaranya adalah rencana penataan kawasan pusat kota yang meliputi Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Pelutan, dan Kelurahan Kebondalem. Ketiga wilayah kelurahan tersebut memiliki

karakteristik aktivitas utama yang bervariasi, utamanya dicirikan dengan aktivitas ekonomi masyarakat seperti perdagangan dan jasa, pusat perkantoran, pusat pendidikan, dan aktivitas kegiatan lain. Kawasan Pusat Kota merupakan kawasan yang menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan. Kampung Gumelem dipilih sebagai kawasan prioritas untuk dilakukan penataan skala kawasan.

Masalah utama pada kawasan kumuh pada Kampung Gumelem adalah ketidakteraturan bangunan akibat pertumbuhan permukiman illegal di sempadan dan di atas saluran air, serta konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kawasan ini rentan mengalami bencana banjir dan kebakaran yang disebabkan kepadatan permukiman yang tinggi, akses jalan permukiman belum memadai dan tidak sesuai persyaratan teknis, serta jaringan drainase yang belum berfungsi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dukungan modal social masyarakat pada program penataan kawasan kumuh pada masa pandemic Covid-19, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam program penataan kawasan kumuh Kampung Gumelem yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya (Sudaryono, 2019). Metode ini bertujuan untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan prosedur analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau metode kuantitatif, melainkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam sebuah konteks alami khusus (Moleong, 2007). Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat dari fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Setiawan, 2013). Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dalam triangulasi yaitu dengan pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi analisis data induktif (Sugiyono, 2016)

Penelitian juga menggunakan metode Participatory Research Appraisal (PRA). Menurut Handayani dalam Heston, (2013) metode penelitian PRA digunakan untuk memastikan keterlibatan aktif dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Teknik dan alat yang digunakan dalam PRA mencakup metode ilmu social yang telah mapan dan teknik komunikasi serta pengumpulan data yang partisipatoris (Mikkelsen, 2003). Metode penelitian PRA menempatkan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran juga sebagai subjek dalam proses kegiatan, dan bukan sebagai objek.

Dalam PRA, peneliti adalah pihak yang terlibat aktif didalam program kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan dengan menyusun rencana, instrumen/indikator, melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan menyusun laporan bersama kelompok sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa metodologi berkelanjutan pada pelaksanaan program pengembangan daerah kumuh untuk memajukan kondisi kehidupan penduduk (Shekhar, 2019). Penelitian mengenai penataan kawasan kumuh Kota Pemalang berfokus pada kampung Gumelem Kelurahan Mulyoharjo. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi yang paling banyak mempunyai permasalahan kumuh, dan merupakan kawasan strategis karena dekat dengan pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Kampung Gumelem dihuni oleh 255 keluarga dengan jumlah 874 jiwa yang menempati 197 unit bangunan hunian.

## HASIL

Kampung Gumelem merupakan salah satu kawasan kumuh di Kelurahan Mulyoharjo, Kebuppaten Pemalang, Jawa Tengah. Lokasinya strategis pada pusat kota Pemalang. Kampung identik dengan suatu lingkungan masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah dan pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya dan dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa atau dipinjam pemiliknya (Patrisia, 2017). Terdapat beberapa isu yang menjadi latar belakang dipilihnya lokasi penelitian, diantaranya adalah isu sosial ekonomi, isu lingkungan, dan isu legalitas tanah. Kampung Gumelem dihuni beberapa kalangan penduduk dengan mata pencaharian yang cukup variatif, sebagian besar adalah buruh pekerja harian lepas, pedagang, PNS, dan wiraswasta.

Terdapat 42 keluarga yang menempati 30 unit bangunan yang berada di atas tanah milik negara atau saluran irigasi. Umumnya warga yang bermukim di atas tanah sempadan dan irigasi adalah penduduk asli Kampung Gumelem yang sudah turun temurun menempati kawasan. Kawasan kampung Gumelem sering mengalami banjir yang disebabkan oleh drainase yang tidak dapat mengalirkan air ke Sungai Srengseng karena terjadinya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan pada saluran drainase. Pada musim hujan air dari saluran meluap sampai ke permukiman hingga menyebabkan genangan air dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini menyebabkan kerusakan sarana, prasarana, dan kondisi lingkungan yang semakin kumuh. Kondisi diperparah dengan adanya penumpukan sampah pada saluran drainase. Lokasi permukiman Kampung Gumelem memiliki 197 unit bangunan dengan rincian 167 unit (85%) bangunan berdiri di atas tanah negara dengan status tanah hak pakai dan 30 Unit (15%) bangunan berdiri di atas tanah legal dengan status tanah hak milik dan (memiliki) bangunan tambahan yang berada di atas sempadan saluran. Kondisi permukiman kumuh Kampung Gumelem Mulyoharjo memberikan dampak negatif terhadap citra Kabupaten Pemalang sehingga dibutuhkan proyek penataan permukiman kumuh yang idealnya identik dengan adanya relokasi.

### **Konseptualisasi Modal Sosial**

Banyak pendapat mengenai definisi modal sosial sehingga membuat konseptualisasi mengenai hal tersebut dapat disesuaikan dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan asalkan dengan terlebih dahulu membahas konsep, dasar intelektual, keragaman aplikasi, dan berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli (Claridge, 2004). Modal sosial kemudian didefinisikan sebagai sumber daya yang muncul dari adanya relasi sosial dan dapat digunakan sebagai perekat sosial guna menjaga kesatuan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dengan didukung oleh adanya kepercayaan dan norma sosial yang dijadikan acuan bersama dalam bersikap, bertindak dan berhubungan satu sama lain (Anggita, 2013). Berdasarkan definisi tersebut bisa diartikan bahwa modal sosial terdiri dari beberapa komponen, yaitu relasi sosial, kepercayaan, dan norma. Relasi sosial yang dimaksud antara lain meliputi partisipasi, kerjasama, kepedulian dan hubungan timbal balik. Briggs (2004) melihat bahwa konsep modal sosial menyoroti nilai mengelola network personal dan profesional yang meliputi atau menghubungkan tiga sektor kehidupan publik (*public, private, non-profit*). Begitu pula antar lintas batas sosial (*klas, gender, ethnic* dll) jaringan seperti ini akan memberikan perencanaan lebih banyak informasi, legitimasi, akses terhadap sumber keuangan, dan hal-hal penting lainnya untuk mencapai tujuan perencanaan, sebagai pembeda dari hanya sekedar membuat rencana. Atau dengan kata lain bahwa konsep sosial memberikan pemahaman tentang bagaimana realitas kehidupan sosial berlangsung. Woolcock (2004) mengimplikasikan hal yang berbeda, dimana modal sosial dapat menjembatani dialog antar berbagai disiplin terhadap

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN: 978-979-587-903-9*

*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

permasalahan masyarakat, sekaligus juga dialog antara praktisi dan teorisi. Secara khusus ia menyatakan bahwa modal sosial dapat dipandang sebagai suatu cara untuk mendapatkan lebih banyak dan pandangan yang lebih baik untuk menjawab permasalahan yang jawabannya memerlukan banyak perspektif.

Program pembangunan pemerintah yang memerlukan dukungan atau partisipasi masyarakat seringkali mengalami hambatan dan tertunda akibat rendahnya modal sosial. Padahal saat ini, percepatan pembangunan di beberapa negara berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat. Pendekatan *top down* sering dipersepsikan sudah kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Modal sosial berupa kepercayaan (*social trust*) berperan sebagai penentu keberhasilan program-program pemerintah. Terutama yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan pengurangan tingkat kesenjangan masyarakat yang terjadi karena masifnya pembangunan infrastruktur.

### **Pelaksanaan Penataan Kawasan**

Relokasi perumahan merupakan kebijakan standar untuk menyelesaikan masalah kekumuhan, kemacetan, dan penyakit sosial lainnya di negara berkembang (Laporte, 1968). Relokasi merupakan kolaborasi antara inovasi dan tradisi. Di satu sisi kebijakan seringkali menghasilkan pemaksaan yang baru dan terarah dari sistem ekologi, struktural, nilai, dan budaya pada masyarakat. Namun disisi lain kebijakan itu dapat mengarah pada hal yang tidak terduga yang bersifat laten seperti adaptasi masyarakat yang direlokasi.

Kegiatan penataan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa kegiatan Pembangunan Akses Jalan penghubung wilayah, revitalisasi saluran drainase, penataan sanitasi lingkungan IPAL komunal, serta Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP). Penelitian ini menganalisis nilai-nilai penting terkait fenomena sosial serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penataan permukiman kumuh di Kampung Gumelem, yang dibagi menjadi tiga tahap yakni tahap persiapan perencanaan program, tahap pelaksanaan program, serta tahap evaluasi dan pengawasan program.

### **1. Tahap Persiapan Program**

Dilakukan perencanaan untuk melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data dan identifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Kampung Gumelem. Kegiatan ini dilakukan dengan cara FGD antara Warga Terdampak Proyek (WTP) Penataan permukiman kumuh di Kampung Gumelem. Pada tahap persiapan menghasilkan output mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan inventarisasi bangunan milik masyarakat Kampung Gumelem. Sosialisasi juga dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan program. Sosialisasi melibatkan WTP Kampung Gumelem khususnya yang terdampak kegiatan penataan permukiman, pembangunan jalan dan drainase. Program penataan permukiman yang berdampak pada pembongkaran elemen pelengkap bangunan diatas saluran irigasi sebanyak 30 WTP/KK.

Hasil dari FGD yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang yang berkolaborasi dengan Pemerintah pusat melalui Program KOTAKU dan WTP Kampung Gumelem di dapatkan informasi bahwa warga setuju dengan dilakukannya pengembalian fungsi saluran irigasi dengan cara pembongkaran bangunan yang ada disepanjang dan di atas saluran, warga juga menyetujui akan adanya kompensasi dari pemerintah sebagai akibat dari pembongkaran sebagian bangunan milik warga. Pemerintah kabupaten Pemalang memberikan bantuan dana untuk pemotongan bagian bangunan yang berada diatas saluran irigasi dan perbaikan kembali bekas pemotongan. Pembongkaran atau pemotongan serta perapihan akan dilakukan sendiri oleh warga dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta penyediaan peralatan angkutan guna membersihkan sisa puing-puing bangunan.

## **2. Tahap Pelaksanaan Program**

Program penataan kawasan kumuh Kampung Gumelem meliputi :

### **1. Penataan bangunan di atas saluran drainase**

Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan permukiman di kawasan Kampung Gumelem menjadi permukiman yang layak huni dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Warga terdampak kegiatan sebanyak 30 unit. Bangunan adalah merupakan bangunan tambahan yang melengkapi bangunan utama. Bangunan utama berdiri diatas tanah milik warga sedangkan bangunan tambahan diatas saluran menyalahi peruntukan tanah dimana sebenarnya bangunan tersebut berdiri diatas tanah yang merupakan tanah milik irigasi tersier atau pemerintah. Kompensasi atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penataan bangunan, dilakukan melalui kesepakatan antara pemerintah bersama WTP guna menentukan bentuk dan jenis kompensasinya. Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan bantuan dana untuk pemotongan bagian bangunan yang berada diatas saluran irigasi dan perbaikan kembali bekas pemotongan. Pembongkaran atau pemotongan dan perapihan akan dilakukan sendiri oleh warga.

### **2. Pembangunan Jalan Pedestrian Kampung Gumelem.**

Pedestrian ini akan dibangun untuk menghubungkan Kampung Gumelem dengan Kelurahan Pelutan. Proses pembangunan jalan harus memperhatikan prinsip pengadaan lahan, diantaranya sebisa mungkin menghindari pengadaan tanah dan relokasi, jika harus malakukan pengadaan tanah maka harus meminimalkan kebutuhan pengadaan tanah dan relokasi. Pengadaan tanah harus melalui proses konsultasi dengan WTP. Dengan pertimbangan tersebut maka pengadaan tanah untuk kawasan kampung Gumelem yakni Panjang jalan akses Gumelem - Pasar Sayur dan Buah Pemalang sepanjang kurang lebih 450 m. Kondisi eksisting status tanah wajib milik Pemda sehingga tidak berpotensi menimbulkan dampak sosial.

### **3. Pembangunan RTP (Ruang Terbuka Publik)**

Guna memenuhi kebutuhan ruang publik di kawasan perkotaan, pembangunan RTP yang memanfaatkan tanah eks lapangan yang berubah menjadi tempat genangan dengan luas  $\pm 11.000$  m<sup>2</sup>. Status Tanah untuk RTP adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk Ijin pemakaian tanah dengan dikeluarkannya Nota Dinas oleh Aset Daerah untuk RTP. Pemerintah Kabupaten Pemalang menggandeng program Kotaku melalui Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Propinsi Jawa Tengah dengan sumber dana APBN (Kotaku).

### **4. Pembangunan IPAL Komunal**

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sub kawasan Gumelem Mulyoharjo Pemerintah kab. Pemalang akan membangun IPAL komunal sebanyak 5 unit untuk memenuhi 99 kk, yang selama ini masyarakat membuang limbah ke saluran irigasi yang ada. Penempatan IPAL pada tanah sempadan saluran irigasi untuk 4 unit dan 1 unit pada jalan lingkungan. Dimensi IPAL Panjang; 4 m dan Lebar 2 meter tanah yang dibutuhkan 5 x 3 m sehingga untuk 5 unit IPAL membutuhkan Tanah 75 m<sup>2</sup> untuk sistem jaringan perpipaan melalui akses jalan lingkungan eksisting.

### **5. Tahap pemantauan dan evaluasi**

Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pokja PKP, Satker atau Bappeda didukung oleh KOTAKU akan melakukan Pemantauan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan

proses penataan permukiman kumuh Kampung Gumelem. Pemantauan dilakukan dalam dua arah, yakni pemantauan secara internal yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama unsur lembaga masyarakat dan pemantauan eksternal dari institusi di luar masyarakat yakni unsur pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis terkait, unsur Provinsi/ Satker PKP. Pemantauan terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja yang disepakati dalam rencana penataan. Juga kunjungan lapangan atau pengawasan akan dilakukan secara berkala.

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi modal Sosial Masyarakat Kampung Gumelem**

Hasil penelitian menunjukkan penataan kawasan kumuh memiliki tantangan besar terutama bagaimana cara menggerakkan partisipasi masyarakat terlebih pada masa pandemi. Salah satu diantaranya adalah perlu adanya penguatan modal sosial yang pada sebagian masyarakat dicirikan dengan kebersamaan dan gotong royong. Modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*network*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Kondisi modal social masyarakat Kampung Gumelem telah diukur menggunakan beberapa parameter diantaranya adalah dengan mengukur tingkat partisipasi masyarakat, kepercayaan, gotong royong, keterbukaan, kepedulian dan timbal balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Masyarakat masih cenderung mewakili aspirasinya pada tokoh-tokoh tertentu saja seperti ketua RT /RW, Tokoh masyarakat/PKK dalam setiap kegiatan musyawarah disetiap tahap kegiatan. Masyarakat cenderung bersikap apatis dalam setiap tahapan kegiatan termasuk dalam merumuskan langkah-langkah penanganan. Masyarakat cenderung memosisikan diri sebagai objek, belum menyadari bahwa mereka sebenarnya merupakan bagian dari pihak yang harus berkontribusi pada program.

Kepercayaan antar sesama masyarakat Kampung Gumelem hanya berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Kemauan untuk berbagi informasi mengenai berjalannya kegiatan penataan kawasan masih rendah karena masyarakat masih beranggapan bahwa informasi mengenai kegiatan penataan hanya terbatas pada forum resmi saja, pemahaman mengenai kegiatan penataan dianggap tidak terlalu penting untuk diketahui oleh setiap warga masyarakat.

Belum terlihat adanya kesadaran akan rasa gotong royong pada masyarakat Kampung Gumelem. Masyarakat berasumsi bahwa program penataan merupakan suatu kewajaran dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kontribusi warga terlihat hanya pada kebersedian untuk merelakan sebagian bangunan rumahnya guna mengembalikan fungsi lingkungannya. Pada kegiatan perapihan bangunan ini kontribusi warga dapat terlihat, meski hanya terbatas pada masyarakat yang terdampak langsung saja.

Sikap keterbukaan warga hanya ditunjukkan sebatas rasa kekhawatiran mereka akan status lahan yang selama ini digunakan melanggar ketentuan peraturan perundangan. Pertukaran informasi pada masyarakat hanya terjadi secara informal, tidak mengemuka pada saat proses penggalian informasi melalui forum-forum musyawarah. Pemahaman peran dalam kelompok belum terlihat karena mereka menganggap mereka adalah objek dari pembangunan selebihnya hanya mengikuti arahan dari penyelenggara pembangunan/program.

Sikap kepedulian warga Kampung Gumelem hanya dalam lingkup kepada kerabat maupun tetangga terdekat saja. Keinginan untuk membantu meringankan beban orang lain hanya sebatas orang yang sudah dikenal dan mempunyai hubungan dekat. Pemberian

bantuan antar sesama warga umumnya bersifat tenaga maupun sedikit materi. Masyarakat Kampung Gumelem masih sangat memegang prinsip timbal balik. Bahwa akan adanya balasan terhadap suatu kebaikan. Apa yang mereka dapatkan dari orang lain, maka akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Meski komunikasi intensif antar warga tidak terjadi secara massif namun masih mencerminkan respon komunikasi yang harmonis.

### **Dukungan Modal Sosial Pada Penataan Kawasan Kampung Gumelem**

Penguatan sosial dilakukan untuk mencapai keberlanjutan dan keterpaduan peran serta kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana penataan permukiman Kampung Gumelem. Hal ini dilakukan guna mengintegrasikan dan mensinergikan kinerja antar pemangku peran. Peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan pada semua tahap, baik persiapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program. Masyarakat berperan dalam implementasi program dengan berpartisipasi merelakan sebagian tanahnya guna pembangunan prasarana umum dan penataan lingkungan. Peningkatan peran dan kemampuan sosial pada Pemerintah dilakukan melalui pembentukan Pokja PKP untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan program penataan kawasan kumuh. FGD dilaksanakan antara Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan masyarakat Kampung Gumelem untuk membahas mengenai masalah yang ada di Kampung Gumelem untuk kemudian di analisis penanganannya, serta membahas potensi pengembangan kawasan. Diperlukan kerjasama dalam pelaksanaan program penataan kawasan kumuh antara Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari institusi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan lembaga masyarakat.

Peningkatan kemampuan sosial pada masyarakat dilakukan melalui pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang bertugas mengelola kawasan berdasarkan kelompok RT. Bentuk peningkatan penguatan sosial dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan (*capacity building*) dan praktek simulasi dalam FGD. Pengetahuan yang disampaikan meliputi upaya membangun citra diri warga dan masyarakat, mengembangkan budaya lingkungan secara mandiri, dengan cara mengelola dana kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencapai tatanan lingkungan yang sehat, nyaman dan asri dengan didukung oleh kelompok masyarakat memiliki peluang mengakses sumber pembiayaan dan dapat di percaya oleh lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta.

Program yang terintegrasi dan sinergi kinerja yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan efektivitas program kerja pemerintah daerah, terkait upaya penataan kawasan dan pengembangan kapasitas kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh. Penguatan sosial dibutuhkan dengan tujuan untuk menyiapkan masyarakat kearah perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Aspek yang dibutuhkan untuk menentukan keberhasilan penguatan modal sosial pada program penataan kawasan kumuh berasal dari tiga hal, yaitu identifikasi potensi masyarakat dan kawasan, sinkronisasi program pemerintah, serta implementasi peraturan dan kebijakan.

### **Penataan Kawasan Pada Era Pandemi**

Aspek penting dalam upaya penataan kawasan permukiman khususnya permukiman kumuh adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter dan bertanggungjawab. Faktor manusia merupakan hal penting dalam menata kualitas permukiman kumuh di perkotaan. Selain sebagai pencipta kekumuhan, mereka juga bisa mengatasi kekumuhan tersebut. Konsep *People Center Development (PCD)* perlu diterapkan dalam menata permukiman



kumuh. Konsep PCD dimaksud adalah menjadikan rakyat sebagai subyek, sebagai obyek dan juga sumber daya. Masyarakat harus menjadi subjek dalam pembangunan penataan permukiman di perkotaan. Masyarakat juga merupakan sumber daya yang memiliki potensi kemandirian, pendidikan dan ekonomi. Problem yang dihadapi perkotaan antara lain permukiman kumuh, kemiskinan, pengangguran dan sanitasi yang buruk.

Kondisi permukiman kumuh juga bisa menjadi tumbuhnya berbagai vektor penyakit. Berbagai vector penyakit dapat pemicu terhadap penyebaran penyakit tidak terkecuali dalam masa pandemi Covid -19 sebagaimana yang dihadapi sekarang ini. Banyak aspek dapat memicu penyebaran pandemi Covid-19 diantaranya :

- 1) Air bersih sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, mengingat frekuensi setiap orang untuk mencuci tangan akan lebih banyak.
- 2) Meningkatnya penggunaan air juga akan menambah kuantitas air limbah yang diproduksi, diikuti dengan limbah-limbah lainnya seperti sampah B3, masker, baju APD, tisu, dan disinfektan.
- 3) Meningkatnya timbulan sampah B3 bisa besumber dari rumah sakit, rumah tangga, hotel maupun fasilitas public lainnya yang ada dilingkungan sekitar Kampung Gumelem.
- 4) Kepadatan bangunan yang tidak memperhatikan aspek spasial dan sosial karena keterbatasan lahan disatu sisi, dan di sisi lain dipicu oleh persoalan ekonomi dan budaya.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah penting dalam penataan kawasan permukiman kumuh di tengah pandemic Covid-19, yakni:

- 1) Kegiatan penataan lingkungan permukiman tetap harus tegas dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan.
- 2) Akses pintu masuk atau gerbang kampung akan dilakukan penyemprotan disinfektan kepada orang yang hendak masuk. Dan juga di setiap pintu masuk akan disediakan tempat cuci tangan dengan sabun untuk orang yang hendak masuk/ keluar kampung.
- 3) Perlindungan yang cukup di dalam lingkungan permukiman serta fasilitas sanitasi yang memadai saat pandemi, karena rumah dan air sangat dibutuhkan dalam kondisi ini
- 4) Mengembangkan ruang kota yang bernilai, memampukan warganya memelihara kesehatan diri, memperkaya modal sosial, membangun gaya hidup produktif secara ekonomi, dan berdampak ekologis yang sedikit
- 5) Kepadatan dalam ruang terbukti lebih rentan terhadap penyebaran Covid-19, apalagi memakai pengondisian udara buatan (*Air conditioning*), karena kepadatan di ruang luar yang mengalirkan udara segar, paparan sinar matahari, serta pengaturan yang jarak dan kepadatan fluktuatif, justru lebih tangguh melawan virus. Berbasis fakta ini, kenormalan baru bagi permukiman padat, misalnya rumah susun perlu dikembangkan
- 6) Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) yang awalnya dipahami untuk paru-paru kota dan resapan air hujan, dikombinasikan dan diselaraskan dengan pengembangan fungsi bangunan sebagai solusi bagi banyak fasilitas publik misal pasar semi terbuka, masjid dengan kebun luas dan terbuka justru lebih sehat dan bermanfaat ganda.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan kapasitas penguatan sosial pada pemerintah kabupaten Pemalang dapat dilakukan dengan mengupayakan setiap instansi pemerintah untuk memberikan kewenangan untuk melaksanakan program penataan kawasan kumuh dengan cara membentuk unit kerja pengelola kawasan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sosial pada penataan kawasan kumuh. Sedangkan penguatan sosial pada masyarakat dapat

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN: 978-979-587-903-9*

*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

dilakukan dengan cara memberi komitmen warga akan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sosial ekonomi pada program penataan kawasan kumuh Kampung Gumelem. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud dalam sebuah kolaborasi, yakni kerjasama operasional berbasis wilayah, maupun kerjasama berbasis sumber dari luar (Turok, 2016). Pemberdayaan masyarakat pada kawasan kumuh melalui partisipasi mereka dalam program penataan kawasan bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola pendanaan pada skala mikro dan peningkatan fisik lingkungan, tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga pendamping masyarakat (Das, 2015).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Nany Yuliastuti, MSP dan Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T yang telah memberikan beberapa masukan terhadap topik ini sehingga tercipta makalah hasil penelitian dengan judul Penguatan Modal Sosial pada Penataan Kawasan Kumuh Kampung Gumelem di Era Pandemi Covid-19. Segala kekurangan dan kelemahan pada penulisan makalah hasil penelitian ini adalah tanggung jawab penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmed I. 2014. Factors in building resilience in urban slums of dhaka, bangladesh, in Proceedings of the International Conference on Building Resilience. *Procedia Economics and Finance* Salford Quays, United Kingdom. 8(10): 745 – 753.
- Anggita, T., 2013. Dukungan Modal Sosial Dalam Konektivitas Usaha Tani Untuk Mendukung Kinerja Produksi Pertanian Studi Kasus: Kabupaten Karawang dan Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 24 (2):203-226
- Briggs, Xavier de Souza. 2004. *Social Capital: Easy Beauty or Meaningful Resource?*. *Journal of American Planning Association*. 7(2). Spring.
- Bryce and Laporte RS. 1968. Family Adaptation of Relocated Slum Dwellers in Puerto Rico: Implications for Urban Research and Development. *The Journal of Developing Areas.*, 2(4) : 53354
- Cahya DL. 2012. Penataan Kawasan Kumuh (Pulo Geulis) Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. *Jurnal Planesa*, 3(1).
- Cahyono, B. Adhiatma, A. 2012. Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesenjangan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. *CBAM Unissula*. 1(1): 131-144
- Das. A. 2015. Autonomous but constrained: *CBOs and urban upgrading in Indonesia*. *Cities* 48. 8–20
- Elgizawy SM, El-Haggag K, Nassar SM. 2016. Slum development using zerowaste concepts: construction waste case study, in Proceedings of the International Conference on Sustainable Design, *Procedia Engineering*. 145: 1306 – 1313.
- Heston, YP. Yusuf, AA. 2013. Penguatan kemampuan sosial pada penataan kawasan kumuh perkotaan (Studi kasus kelurahan cigugur tengah cimahi), *J. Tata Loka* Vol. 15(3): 208 – 217.
- Mikkelsen, B. 2003. Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong LJ. 2007. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung Remaja. PT Rosdakarya*

- Patrisia NE. 2017. Penataan Permukiman Kumuh Kota Berbasis Kawasan, *J. Professional FIS UNIVED*, 4(2).
- Putnam. 2004. *Using Social Capital to Help Integrate Planning Theory, Research, and Practice*. Preface of Journal of American Planning Association, 70 (2), Spring.
- Shekhar, S. Effective management of slum- case study of kalaburagi city, karnataka, India, *journal of urban management*, (to be published)
- Simorangkir YV, Octavia S and Raubaba HS. 2019. *Slums as a result of urbanization*. IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science* 343. 012230. doi:10.1088/1755-1315/343/1/012230
- Sudaryono. 2019. Metodologi Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan Mix Method. Rajawali Pers. Depok
- Sugiyono H. 2016 . Metode kualitatif dan kuantitatif Cetakan ke-23. *Alf. Bandung*
- Turok I . 2016. Housing and The Urban Premium . *Habitat International* . 54: 234-240
- Uddin N. 2018. Assesing Urban Sustainability Of Slum Settlements In Bangladesh: Evidence From Chittagong City, *Journal Of Urban Management*. (7): 32 – 42.
- Williams SW. 1997. *The Brown Agenda: Urban Environmental Problems and Policies in the Developing World* . Geography Association. 82(1): 17-26.